

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini. Dalam bab ini teori yang akan dibahas yaitu definisi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum. Serta akan dikemukakan hipotesis dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

2.1 Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan juga merupakan suatu permasalahan yang tidak hanya dialami oleh negara berkembang namun juga dialami oleh negara-negara maju. Menurut Ritonga (2003), kemiskinan merupakan kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, sandang, papan dan kebutuhan sosial. Menurut Kuncoro (2013) Kemiskinan terjadi karena sumber daya manusianya yang rendah dan, akses kegiatan perekonomian yang belum maksimal, dan belum meratanya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang selalu ada dalam suatu negara atau daerah di mana permasalahan ini berkaitan dengan produktivitas, produksi dan konsumsi dalam perkembangan masyarakat atau individu sebagai suatu wujud dari kebijakan pemerintah.

Menurut Tambunan (2019) kemiskinan dapat digolongkan dalam beberapa kategori yaitu:

1. Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di bawah, di mana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Hal ini merupakan suatu ukuran tetap dalam bentuk kebutuhan minimum ditambah komponen non makanan yang juga sangat diperlukan.
2. Kemiskinan relatif, adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan dalam distribusi pendapatan, dapat didefinisikan dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi pendapatan. Di negara-negara maju, kemiskinan relatif diukur sebagai suatu proporsi dari tingkat pendapatan rata-rata perkapita sebagai suatu ukuran relatif, kemiskinan relatif dapat berbeda menurut negara atau periode di dalam suatu negara.
3. Kemiskinan alamiah disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Dalam kondisi tersebut, peluang untuk melakukan dan meningkatkan produksi relatif kecil dan tingkat efisiensi produksinya relative rendah.
4. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh budaya penduduk yang malas, tidak mau kerja keras, etos kerja sangat rendah, tidak disiplin dan sebagainya.

Menurut Kuncoro (2007) pendekatan kebutuhan dasar mempunyai tiga kelemahan utama yaitu:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar

Kelemahan ini sangat melekat pada pengukuran kemiskinan absolut karena pada hakekatnya kemiskinan hanya dilihat dari sisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar atau standar tertentu, padahal kemiskinan sangat kompleks dan mempunyai banyak dimensi sosial dan kultural.

2. Pengukuran standar kebutuhan minimum

Standar kebutuhan minimum ditetapkan dengan lebih mengutamakan kepentingan untuk dapat semaksimal mungkin mengakomodasi perbedaan pola konsumsi antar wilayah dan dinamika perubahan pola konsumsi antar waktu. Selain itu, perbandingan garis kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan yang digunakan dalam metode Badan Pusat Statistik kurang merepresentasikan perbedaan biaya hidup riil antara daerah perkotaan dan pedesaan.

3. Pengukuran nilai standar minimum

Pengukuran harus didasarkan pada harga-harga yang sebenarnya dibayar oleh penduduk miskin. Harga-harga yang sebenarnya dibayar oleh penduduk hidup sedikit di atas garis kemiskinan (*the near poor*) seperti dalam metode Badan Pusat Statistik, atau bahkan diukur dengan harga-harga yang tercatat dalam survei harga sebagaimana digunakan dalam indeks harga konsumen.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam menentukan kemiskinan. Berikut indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2022):

1. Penduduk Miskin

Bps menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pada pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

2. Garis Kemiskinan (GK)

Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama satu bulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori per kapita perhari. Garis kemiskinan non makanan merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non makanan berupa perumahan, sandang, kesehatan, dan kesehatan.

3. Persentase Penduduk Miskin

Head count index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty gap index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari kemiskinan.

5. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan (*Proverty severty indeks-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang antara lain:

1. Kemiskinan menurut standar hidup yang layak

Kemiskinan terjadi Ketika tidak terpenuhinya kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar. Artinya, seseorang atau suatu rumah yang termasuk dalam kategori miskin apabila atau keluarga tidak mampu dalam emenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan standar hidup yang layak. Kemiskinan seperti itu disebut juga sebagai kemiskinan absolut

2. Kemiskinan menurut tingkat pendapatan

Kemiskinan terjadi disebabkan oleh kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Penyebab kemiskinan dapat dibagi menjadi empat yaitu:

1. *Individual explanation*, bahwa kemiskinan cenderung diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri. Karakteristik yang dimaksud ialah malas dan kurang sungguh-sungguh dalam segala hal termasuk dalam bekerja.
2. *Familial explanation*, bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor keturunan. Tingkat pendidikan orangtua yang rendah telah membawa dia kedalam kemiskinan, karena tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, sehingga anaknya akan juga akan jatuh ke dalam kemiskinan.
3. *Subcultural explanation*, bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh kultur, kebiasaan, adat istiadat dan perilaku lingkungan. Contohnya Ketika seseorang lebih memilih mengabdikan kepada para raja atau petinggi meski tidak diberi bayaran yang berakibat pada kemiskinan.
4. *Structural explanation*, bahwa kemiskinan timbul akibat ketidakseimbangan perbedaan status yang dibuat oleh adat istiadat, kebijakan, dan aturan yang menimbulkan perbedaan hak untuk bekerja, sekolah dan lainnya hingga menimbulkan keseimbangan diantara mereka yang statusnya rendah dan hak yang terbatas.

Menurut Chambers (2006), berpendapat bahwa pengertian kemiskinan sangat tergantung pada siapa yang bertanya, bagaimana hal itu dipahami serta siapa yang meresponnya. Prespektif ini mengelompokkan makna kemiskinan dari sudut pandang pendapatan atau pengeluaran (konsumsi).

1. Kelompok yang memandang kemiskinan dari sisi pendapatan, sulit untuk mengukurnya karena dekat dari sisi pengeluaran. Sebagian orang terutama pakar ekonomi cenderung menggunakan konsep ini. Mereka akan melihat kemiskinan dari sudut pandang pendapatan atau pengeluaran.
2. Kedua kelompok yang memaknai kemiskinan dan kekurangan materi. Kemiskinan juga diartikan sebagai kurangnya kekayaan, rendahnya kualitas asset lain seperti rumah tempat tinggal, pakaian, peralatan rumahtangga, sarana transportasi, peralatan akses komunikasi dan informasi seperti TV, dan radio, serta rendahnya akses terhadap fasilitas lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.
3. Kelompok ketiga mengacu pada pendapat Amartya Sen, bahwa kemiskinan dinyatakan sebagai kekurangan atau ketidakmampuan, serta kekurangan material, ketidakmampuan fisik, serta dimensi sosial.
4. Kelompok keempat mengartikan kemiskinan dengan konsep luas mencakup multidimensi kekurangan.

Dalam Maipita (2014), Lembaga-lembaga internasional turut mengembangkan berbagai ukuran yang dapat mencerminkan kemiskinan yang terjadi. Ukuran-ukuran tersebut seperti indeks harapan hidup, indeks melek huruf, indeks kematian ibu dan bayi, indeks pembangunan manusia, indeks kemiskinan dan lainnya. Ukuran-ukuran tersebut mencoba melihat kemiskinan dari sisi yang lebih luas seperti kualitas hidup.

United Nation Development Programme (UNDP) meluncurkan beberapa indeks yang berhubungan dengan kemiskinan. Indeks-indeks tersebut seperti:

1. *The Human Development Indeks* (HDI) merupakan ukuran pembangunan manusia dari sisi yang lebih luas. HDI mengukur pencapaian rata-rata diberbagai negara dalam tiga dimensi dasar yaitu pertama hidup yang panjang dan sehat, di mana hal tersebut diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, kedua pengetahuan yang diukur dari tingkat melek huruf orang dewasa dan kombinasi rasio angka partisipasi kasar (APK) untuk jenjang sekolah dasar, menengah dan atas, ketiga standar hidup yang layak yang diukur dengan GDP per kapita dalam paritas daya beli (PPP).
2. *The Human Poverty Index* (HPI) merupakan suatu indeks yang mengukur kekurangan yang ada pada HDI. Sehingga, dimensi yang ada di HDI juga ada pada HPI, namun diukur dengan cara berbeda dan lebih khusus.
3. *The Gender Related Development Index* (GDI) merupakan suatu indeks yang mengukur ketimpangan atau ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi. Dimensi tersebut ialah dimensi hidup panjang dan sehat, diukur dengan tingkat harapan hidup dari laki-laki dan perempuan, dimensi pengetahuan diukur dengan tingkat literasi orang dewasa digabung dengan pendidikan dasar, menengah, dan atas, dan dimensi hidup layak yang dengan mengestimasi pendapatan yang diperoleh.

4. *The Gender Empowerment Measure (GEM)* merupakan indeks yang mengukur tingkat upaya pemberdayaan gender. Fokus pada kesempatan ini diperoleh atau diberikan pada kaum perempuan.

Sejak tahun 2010 dalam UNDP tidak lagi mengeluarkan ukuran tersebut, namun UNDP mengeluarkan empat indeks yang berhubungan dengan kemiskinan. Keempat indeks berikut ialah *Human Development Index*, *Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI)*, *Gender Inequality Index (GII)*, dan *Multy Dimensional Poverty Index (MPI)*. Sejak tahun 2010, HDI diukur dengan cara yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Walaupun dengan dimension yang sama seperti hidup yang panjang dan sehat, akses terhadap pengetahuan, dan standar hidup layak, namun ukuran yang digunakan yaitu indeks rata-rata geometri yang dinormalisasikan untuk setiap dimensi.

IHDI mengukur ketidakmerataan distribusi masing-masing dimensi dari HDI. IHDI diukur menggunakan rata-rata geometri dimensi. IHDI merupakan tingkat actual dari pembangunan manusia dengan memperhitungan ketimpangan distribusi. GII mencerminkan kekurangan dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. GII menunjukkan kekurangan dan kerugian dalam pembangunan manusia akibat ketimpangan gender indeks ini diukur menggunakan asosiatif sensitif. MPI mengukur beberapa beberapa kerugian dan kehilangan individu atau rumah tangga terhadap tiga dimensi. MPI mencerminkan

kekurangan multidimensi dan merupakan gambaran komprehensif tentang orang miskin.

2.1.1 Perangkap Kemiskinan

Perangkap kemiskinan merupakan hal yang sering menjadi masalah di berbagai negara. Perangkap kemiskinan merupakan suatu mekanisme yang membuat orang miskin tetap miskin atau bahkan lebih miskin. Kapasitas kecil dalam tabungan mengakibatkan pendapatan riil yang rendah. Pendapatan riil yang rendah berkaitan dengan produktivitas yang rendah. Apabila keadaan berjalan semakin lama, maka kondisi dapat mengakibatkan kekurangan kapital atau modal. Kekurangan modal akan mengakibatkan investasi yang rendah, produktivitas yang rendah, dan tingkat kapasitas tabungan yang rendah. Mekanisme ini akan terus berputar dan menyulitkan seseorang untuk keluar dari perangkap kemiskinan.

Terdapat lima keadaan kurang menguntungkan yang saling terkait, sehingga seseorang atau masyarakat akan sulit keluar dari perangkap kemiskinan. Kelima keadaan yang tidak menguntungkan ialah: kelemahan dalam hal fisik, rentan terhadap guncangan, terisolasi, ketidakberdayaan, dan kemiskinan itu sendiri.

Permasalahan kebijakan kemiskinan di Indonesia selama ini ialah kurangnya koordinasi antar lembaga. Program pengurangan kemiskinan sering dilakukan secara parsial oleh satu atau berbagai lembaga tanpa didasari oleh koordinasi yang baik. Akibatnya, program yang diluncurkan kurang tepat sasaran, kurang terarah dan

terkontrol, bahkan dapat menimbulkan program tumpang-tindih. Pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang disempurnakan oleh Perpres Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden ini mengamanatkan pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dirumuskan oleh pemerintah dalam empat arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan program perlindungan sosial.
2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar.
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin.
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Terdapat empat strategi pengurangan kemiskinan yaitu:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha masyarakat.
4. Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan output per kapita yang menunjukkan pertumbuhan upah riil dan meningkatnya standar taraf hidup. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami pertumbuhan apabila kegiatan ekonomi saat ini, yang telah dicapai lebih tinggi dari periode waktu sebelumnya. Ada beberapa defenisi mengenai pertumbuhan ekonomi yaitu:

2.2.1 Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Dalam Arsyad (2010) Teori Schumpeter mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sebab konjungtur. Schumpeter mengemukakan pertumbuhan ekonomi tidak berlangsung secara terus-menerus namun beberapa saat tertentu mengalami kelambatan. Konjungtur disebabkan karena para pelaku usaha melakukan berbagai inovasi dalam usahanya agar mampu menghasilkan barang maupun jasa. Sebelum inovasi terbaru dilakukan, para pelaku usaha membutuhkan suntikan investasi agar peningkatan kegiatan perekonomian tumbuh karena adanya investasi.
2. Teori Harrod-Domar dengan melengkapi analisis Keynes menyatakan penentuan tingkat kegiatan ekonomi, dijelaskan bahwa pembelajaan secara agregat dapat menjadi penentu peningkatan suatu kegiatan perekonomian. Keynes mengembangkan analisa konsumsi rumah tangga dan investasi

perusahaan agar dapat menentukan tingkat pendapatan nasional. Sedangkan analisa Harrod-Domar menyatakan bahwa akibat yang ditimbulkan dalam investasi akan menyebabkan peningkatan jumlah barang modal dan jumlah barang modal harus menunjukkan peningkatan permintaan agregat. (Arsyad, 2010)

3. Teori Solow: Untuk mengetahui maju tidaknya suatu perekonomian diperlukan adanya suatu alat pengukur yang tepat. Pertumbuhan ekonomi bergantung pada peningkatan penyediaan faktor-faktor produksi seperti populasi, tenaga kerja, dan akumulasi modal, serta tingkat kemajuan teknologi. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan ekonomi ditentukan oleh faktor produksi diikuti oleh tingkat kemajuan teknologi.

Tiga faktor-faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Akumulasi Modal

Akumulasi modal terjadi apabila sebagian pendapatan yang didapatkan ditabung dan kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa-masa mendatang.

2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja,

maka semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi dengan cara baru dan cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional,

Menurut Arsyad (2010), penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dampaknya sangat berpengaruh terhadap masyarakat kecil maupun besar. Naik turunnya pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah harus berperan secara aktif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sejahtera.

2.3 Teori Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan pengukuran perbandingan antara harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara. Menurut Arsyad (2010) Indeks pembangunan manusia merupakan suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan dan standar kehidupan. Menurut Badan Pusat Statistik (2022), Indeks Pembangunan Manusia merupakan pencapaian pembangunan berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu alternatif pengukuran pembangunan selain menggunakan Gross Domestic Bruto.

IPM merupakan suatu konsep yang diperkenalkan pertama kali oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 1990, konsep ini mencoba

menggabungkan antara Indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks daya beli. *The United Development Program* (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai sebuah proses dalam memperluas pilihan masyarakat. UNDP menyusun alternatif kesejahteraan yaitu dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia.

Badan Pusat Statistik (2022) mengatakan indeks pembangunan manusia merupakan alat untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang berbasis pada komponen dasar kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia dibangun dengan tiga pendekatan dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan kesehatan, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Dimensi kesehatan diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir. Sedangkan untuk dimensi pengetahuan diukur dengan gabungan dari indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dimensi standar hidup yang layak diukur dengan indikator kemampuan daya beli masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar. Indeks Pembangunan Manusia merupakan komponen pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi terlebih lagi permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan yang ada diantaranya berupa masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang tidak

menyeluruh dan masalah keberhasilan pembangunan manusia dilihat dari aspek ekonomi lainnya.

2.3.1 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, di antaranya:

- a. Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- b. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- c. Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- d. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Menurut Kuncoro (2009), komponen-komponen yang dapat dilihat dalam mengukur IPM didasarkan pada komponen dasar kualitas hidup yang terdiri dari angka harapan hidup, standar kehidupan yang layak dan indeks pendidikan. Komponen-komponen yang mengukur indeks pembangunan manusia sebagai berikut:

1. Indeks Harapan Hidup atau Angka Harapan Hidup

Indeks harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, dan meningkatkan derajat kesehatan. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya yang

termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori dan termasuk pada program pemberantasan kemiskinan.

2. Standar Layak Hidup

Standar hidup yang layak digambarkan kesejahteraan dirasakan oleh masyarakat sebagai dampak dari perekonomian yang membaik. UNDP menggunakan GNP/GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator hidup layak dalam menjelaskan bahwa untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB perkapita karena PDRB perkapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan *concern* IPM.

3. Indeks Pendidikan

Indikator pendidikan diukur dari dua variabel yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun keatas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah hingga belum pantas untuk melihat rata-rata lama sekolahnya.

2.4 Teori Upah Minimum

Upah merupakan harga yang dibayarkan oleh para pekerja atas jasanya dalam memberikan tenaga kerja yang diberikan. Upah merupakan hak para karyawan yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Upah minimum merupakan standar minimum yang digunakan oleh para pelaku industri dalam memberikan upah kepada para pekerjanya.. Apabila masa kerja para pekerja satu tahun atau lebih, maka akan mengacu pada pedoman struktur dan skala wajib yang disusun oleh perusahaan. Menurut Badan Pusat Statistik (2023) upah minimum dibayarkan sesuai dengan jenis jabatan atau pekerjaan dan juga termasuk dengan tunjangan, namun tidak dengan tunjangan upah lembur. Upah minimum biasanya ditentukan oleh pemerintah dan setiap tahunnya yang bisa berubah sesuai dengan tujuannya. Upah minimum biasa diberikan menurut surat perjanjian kerja, dan kesepakatan atas pelaku industri dan karyawan.

Terdapat beberapa jenis upah yaitu:

1. Upah nominal, yaitu upah yang dibayarkan atau diberikan kepada para pekerja secara tunai.
2. Upah nyata, yaitu upah yang benar-benar harus diterima oleh para pekerja yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh besar kecil jumlah uang yang diterima dan besar kecil biaya hidup yang diperlukan.

3. Upah hidup, yaitu upah yang diberikan kepada para pekerja dengan nilai yang cukup dalam membiayai kebutuhan hidupnya secara luas, bukan hanya kebutuhan pokok tetapi juga kebutuhan sosial.
4. Upah minimum, yaitu upah terendah yang dijadikan standar oleh para pelaku usaha dalam menentukan upah yang akan diberikan kepada para pekerjanya.
5. Upah wajar, yaitu upah yang diberikan secara cukup wajar kepada para pekerja sesuai dengan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

Tujuan ditetapkannya upah minimum ialah:

1. Untuk melihat arti peranan tenaga kerja dalam suatu hubungan pekerjaan.
2. Untuk memberikan hak dan apresiasi kepada para pekerja atas jasanya dalam memberikan tenaga kerja.
3. Untuk melindungi para pekerja atas adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan tidak sesuai atas pekerjaan yang mereka lakukan.
4. Untuk memberikan jaminan ketenangan dan kedamaian dalam pekerjaan.
5. Untuk meningkatkan taraf hidup para pekerja.

Komponen upah terdiri upah pokok dan tunjangan tetap. Penghasilan pokok terdiri dari:

1. Upah pokok, yaitu imbalan yang diberikan kepada para pekerja menurut tingkat dan jenis pekerjaan yang dilakukan.

2. Tunjangan tetap, yaitu upah yang diberikan secara teratur kepada para pekerja. Tunjangan tetap diberikan sesuai dengan satuan waktu yang sama dengan pemberian upah pokok. Upah tunjangan biasanya terdiri dari tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, dan lain-lain.
3. Tunjangan tidak tetap, yaitu upah yang diberikan secara tidak tetap dan tidak menentu. Tunjangan tidak tetap diberikan tidak sama dengan diberikannya upah pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap terdiri dari tunjangan transport atau tunjangan makan.

Terdapat bonus yang diberikan perusahaan untuk para pekerjanya yaitu:

1. Fasilitas, yaitu kenikmatan yang diberikan kepada para karyawan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Contoh fasilitas yang diberikan yaitu: fasilitas kendaraan, pemberian makanan dan snack, sarana ibadah, koperasi, kantin, dan sebagainya
2. Bonus upah, yaitu pemberian upah kepada para karyawan karena memiliki prestasi atas kinerja yang dilakukan. Contohnya pencapaian atas pekerjaan yang diberikan melebihi target yang ditentukan.
3. Tunjangan hari raya dan pembagian keuntungan lainnya seperti memberikan waktu lebih dari jam kerja yang ditentukan (lembur).

Penetapan upah minimum ditetapkan berdasarkan pada kebutuhan hidup pekerja atau kehidupan hidup layak. Pasal 25 PP 36/2021 yang merupakan turunan

undang-undang cipta kerja menyatakan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Pasal 25 ayat (1) PP 36/2021, menyatakan upah minimum terdiri atas dua yaitu upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu, yaitu:

1. Upah minimum provinsi, yaitu upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur setiap tahunnya dan berlaku di seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
2. Upah minimum kabupaten/kota, yaitu upah yang berlaku di setiap daerah kabupaten/kota.

Kewenangan penetapan upah minimum yaitu dengan mengetahui alur kerja dan mekanisme penetapan upah yaitu:

1. Upah minimum provinsi, penyesuaian nilai upah minimum provinsi dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi. Hasil perhitungan diberikan kepada gubernur melalui kepala dinas ketenagakerjaan provinsi. Upah minimum provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur.
2. Upah minimum kabupaten/kota, perhitungan dan penyesuaian nilai upah minimum provinsi dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi. Hasil perhitungan disampaikan kepada bupati/walikota dan diberikan kepada gubernur melalui kepala dinas ketenagakerjaan provinsi. gubernur meminta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi dalam menetapkan upah minimum yang direkomendasikan oleh bupati/walikota. Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan gubernur.

2.5 Human Capital

Menurut Santoso (2012), *Human capital* atau modal manusia merupakan modal sumber daya manusia yang menjadi aset berharga perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. *Human capital* juga merupakan upaya mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam mencapai tingkat terpenting yang lebih tinggi secara kinerja. *Human capital* dapat berbentuk kecerdasan, kecakapan, ambisi, tingkat kesehatan dan tingkat keterampilan. Dalam *human capital*, seseorang akan berusaha meningkatkan pendapatannya agar dapat hidup lebih baik. Bila seseorang memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya maka ia akan dapat memenuhi keinginan konsumsinya. Naiknya pendapatan yang diperoleh mengartikan bahwa daya beli konsumen juga akan naik. Peningkatan pendapatan tersebut sangat tergantung dari kemampuan, keterampilan atau pendidikan yang dimiliki. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan memiliki kemungkinan yang besar dalam memperoleh pendapatan yang tinggi.

Modal manusia dapat mempengaruhi kualitas tenaga kerja. Modal manusia dapat berbentuk:

1. Karakter individu

Karakter individu merupakan sifat yang dibawa sejak seseorang dilahirkan.

Karakter individu mencakup tingkat kecerdasan, kecakapan, dan ambisi.

Perkembangan karakter individu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Konsep ukuran untuk

mengetahui tingkat kecerdasan ialah melalui kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional.

2. Tingkat kesehatan

Tingkat kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas modal manusia. Semakin tinggi tingkat kesehatan seseorang maka semakin tinggi tingkat kemampuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu hal. Faktor kesehatan ini dibentuk dari asupan nutrisi yang seimbang maupun lingkungan sanitasi. Tingkat kesehatan dapat dilihat dari usia harapan hidup bagi orang dewasa dan tingkat kematian pada usia anak-anak.

3. Tingkat keterampilan

Tingkat keterampilan berupa pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Pendidikan merupakan usaha formal maupun informal dalam mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari suatu bidang. Pelatihan merupakan upaya yang dilakukan untuk melatih kecakapan dalam menjalankan suatu prosedur kerja tertentu. Pengalaman merupakan keterlibatan seseorang dalam suatu bidang keterampilan.

2.5.1 Pendidikan sebagai keputusan investasi

Dalam Santoso (2012) pendidikan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas *human capital* tenaga kerja. Upaya untuk meningkatkan modal manusia dianggap sebagai keputusan investasi. Investasi manusia dalam membangun

human capital dapat dibagi menjadi tiga yaitu saat usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa, dan pada saat memasuki dunia kerja. Pada saat anak-anak investasi *human capital* berupa bimbingan masa anak-anak dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sosial seperti di sekolah. Pada usia remaja dan dewasa, *human capital* diperoleh dari pendidikan formal di sekolah. Pada usia memasuki kerja diperoleh dari pengalaman, *on the job training*, pelatihan keterampilan, maupun program kursus.

Investasi pendidikan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Usia

Kesempatan menikmati hasil pendidikan lebih panjang serta *opportunity cost* yang kecil membuat anak muda lebih banyak yang memilih melanjutkan pendidikan dibandingkan dengan orangtua.

2. Orientasi Kekinian

Seseorang lebih memilih kehidupan saat ini dari pada kehidupan yang akan datang. Orang yang terlalu berorientasi saat ini tidak akan memilih melanjutkan pendidikan.

3. Biaya Langsung

Biaya langsung merupakan biaya yang dikeluarkan secara langsung oleh orang yang berinvestasi pada biaya finansial seperti pembelian buku, pembayaran SPP, dan biaya hidup selama kuliah.

4. *Opportunity Cost*

Opportunity cost merupakan biaya tidak langsung yang dimana seseorang tidak secara langsung mengeluarkan uang untuk membiayai pendidikannya.

5. Kestinambungan Pekerjaan

Kestinambungan pekerjaan merupakan kelanjutan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan, untuk mendapatkan pekerjaan dengan posisi dan upah yang tinggi.

6. Hambatan Kesejahteraan

Hambatan kesejahteraan merupakan pembiayaan pendidikan dengan melihat kondisi kesejahteraan seseorang. Permasalahan yang sering muncul karena biaya pendidikan yang relatif tinggi.

2.6 Produktivitas Tenaga Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) produktivitas tenaga kerja merupakan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Produktivitas tenaga kerja mengacu pada output yang dapat dihasilkan oleh pekerja. Hal ini berlaku baik pada perusahaan, industri, dan perekonomian.

Mankiw (2007) menjelaskan bagaimana upah berhubungan dengan produktivitas tenaga kerja. Terdapat beberapa poin yang dijelaskan. Pertama, jika pekerja dibayar dengan upah yang memadai, mereka dapat membeli nutrisi yang lebih baik, dan pekerja yang lebih sehat cenderung lebih produktif. Teori ini terutama berlaku di negara-negara yang masih miskin dan sedang berkembang.

Kedua, dalam konteks negara maju, teori yang relevan menyatakan bahwa upah yang tinggi dapat mengurangi tingkat pergantian pekerja. Artinya, semakin tinggi upah yang dibayarkan oleh perusahaan, semakin besar insentif bagi pekerja untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut. Dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan dapat mengurangi frekuensi pekerja yang meninggalkan pekerjaan, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk merekrut dan melatih pekerja baru.

Ketiga, kualitas rata-rata tenaga kerja dalam perusahaan bergantung pada upah yang dibayarkan kepada karyawan. Jika perusahaan mengurangi upah, pekerja terbaik mungkin akan mencari pekerjaan di tempat lain, meninggalkan perusahaan dengan pekerja yang kurang terampil dan memiliki lebih sedikit alternatif pekerjaan.

Keempat, upah yang tinggi dapat meningkatkan usaha yang dilakukan oleh pekerja. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat secara sempurna memantau upaya kerja para pekerja, dan pada akhirnya keputusan untuk seberapa keras bekerja merupakan keputusan individu pekerja. Para pekerja dapat memilih untuk bekerja keras atau bermalas-malasan, dengan risiko tertangkap dan dipecat.

Dalam rangkaian penjelasan tersebut, Mankiw menggambarkan bagaimana upah memiliki dampak penting terhadap produktivitas tenaga kerja dan berbagai faktor yang terkait dengan hubungan antara upah dan produktivitas.

2.7 Penelitian Terdahulu

Sarwono dan Irianto (2016) menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik periode 2000-2013. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan pengeluaran pemerintah, maka kemiskinan di Indonesia semakin rendah.

Lumbantobing dan Pratiwi (2019) bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik periode 2004-2016. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi panel dengan *fixed effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia, sedangkan pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia.

Susanto dan Budiarmo (2017) bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik

periode 2000-2014. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel yaitu pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.

Yuniarsih dan Sari (2018) bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik periode 2006-2016. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi panel dengan *fixed effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia, sedangkan pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan.

Suharti dan Djazuli (2013) bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik tahun 2007-2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, IPM, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.

Kusumawati dan Rokhman (2019) bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode

2000-2017. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan pengangguran dan inflasi memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia.

2.8 Hipotesis

Berdasarkan pada pemaparan rumusan masalah yang diatas, maka hipotesis yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Diduga bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2021.
2. Diduga bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2021.
3. Diduga bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2021.